

**TINJAUAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



Juwita

105731112117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA
TINJAUAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

Juwita

NIM : 105731112117

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemajuan.”

"Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fi sabilillah hingga dia kembali." - HR. Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa, cinta dan dukungannya.

Kepada keluarga, teman-teman, dan rekan seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Juwita
No.Stambuk/NIM : 105731112117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

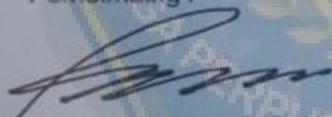
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

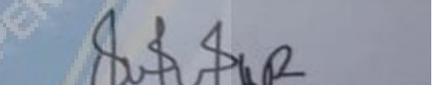
Makassar, 20 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

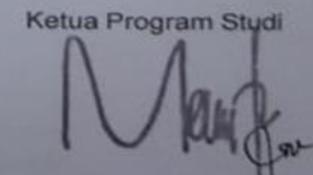

Muh. Rum, SE, M.Si
NIDN: 0020096301


Dr. Mukminatir Ridwan, SE, M.Si
NIDN: 0919017901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis

Dr. H. Andi Paiman, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama : Juwita, Nim : 105731112117 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/62201/091004/2024 Tanggal 14 Muharram 1446 H/ 20 Juli 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Muharram 1446 H
20 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Ansyarif khalid, S.E., M.Si., Ak., CA
 2. Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak. CA
 3. Mira, SE., M.Ak., Ak
 4. Masrullah, SE.,M.Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



FAKULTASEKONOMIDANBISNIS
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR
Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juwita

Stambuk : 105731112117

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

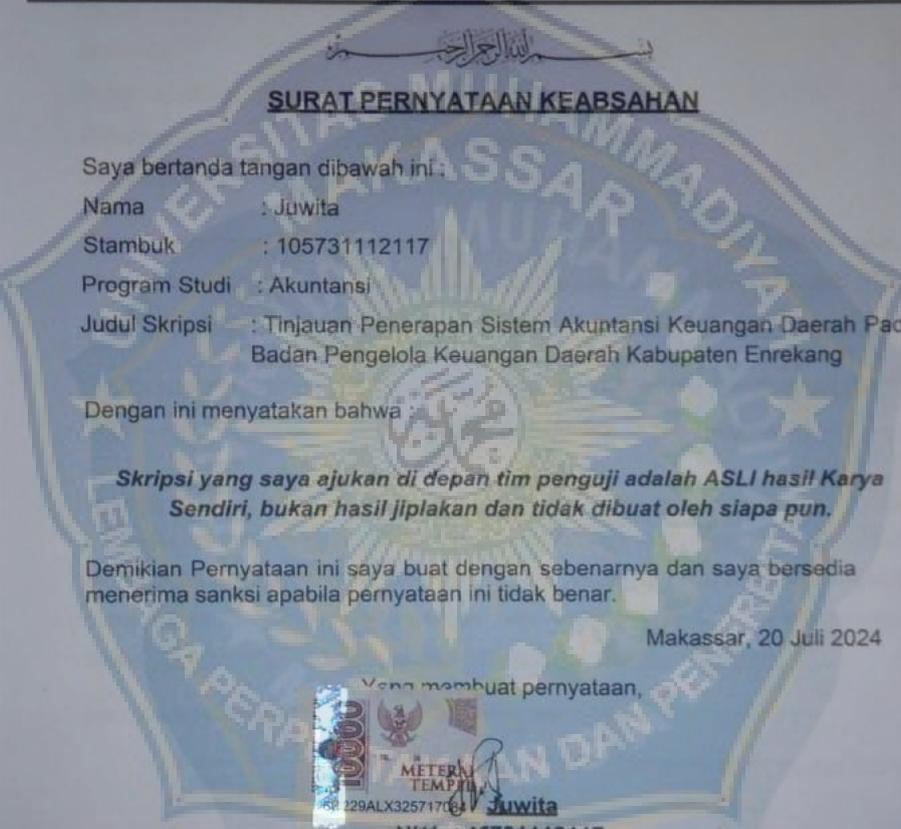
Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAN
TEMPAT
Rp 229ALX325717064

NIM: 105731112117

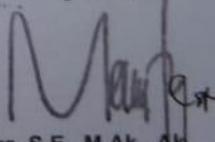
Diketahui Oleh,



Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita
Stambuk :105731112117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalhmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,


A24ALX325717080 **Juwita**
NIM: 105731112117

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wa sallam, sebagai suri tauladan di muka bumi serta penyempurna akhlak umat manusia.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah " Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang".

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, serta mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Si.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muh. Rum, SE.,M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Mukminati Ridwan, SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat di JNE Keluarga Kepma Lemba, HPMM, MASSAMPU, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari unsur kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis serta minimnya pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya serta bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dan segala bentuk bantuan yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak langsung dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, 2024

Penulis



Abstrak

JUWITA, 2024 “ *Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang*” . Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muh. Rum dan Mukminati Ridwan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang, khususnya terkait sistem akuntansi piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya, pendapatan, beban, koreksi kesalahan, dan penyajian kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKD oleh BPKD Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017. Sistem akuntansi piutang mencatat semua transaksi piutang dalam laporan neraca, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang pendapatan, dan beban dibayar di muka. Sistem akuntansi persediaan mencatat persediaan beban pakai habis seperti alat tulis kantor pada laporan neraca. Sistem akuntansi aset tetap mencatat seluruh aset tetap dan penyusutannya dalam laporan neraca. Sistem akuntansi aset lainnya mencatat tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lainnya dalam laporan neraca. Sistem akuntansi pendapatan disusun dalam laporan operasional, mencakup pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sistem akuntansi beban mencatat beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan, dan beban transfer dalam laporan realisasi anggaran. Sistem akuntansi koreksi kesalahan mencatat koreksi nilai aset tetap dan persediaan yang mempengaruhi ekuitas. Sistem akuntansi penyajian kembali mencatat koreksi nilai aset tetap dan persediaan dalam laporan neraca setelah dilakukan koreksi.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

ABSTRACT

Juwita, 2024. "Review of the Implementation of the Regional Financial Accounting System at the Regional Financial Management Agency of Enrekang Regency." Thesis, Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Muh. Rum and Mukminatid Ridwan.

This study aims to review the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Enrekang Regency, specifically focusing on the accounting systems for receivables, inventory, fixed assets, other assets, revenue, expenses, error correction, and restatement. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, where data is collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of SAKD by BPKD Enrekang Regency is in accordance with Enrekang Regency Government Regulation No. 7 of 2017. The receivables accounting system records all receivable transactions in the balance sheet, including cash and cash equivalents, long-term investments, revenue receivables, and prepaid expenses. The inventory accounting system records consumable inventory such as office supplies in the balance sheet. The fixed asset accounting system records all fixed assets and their depreciation in the balance sheet. The other assets accounting system records long-term receivables, partnerships with third parties, intangible assets, and other assets in the balance sheet. The revenue accounting system is compiled in the operational report, including local revenue such as regional taxes and levies, and transfer revenue from the central government. The expense accounting system records employee expenses, goods and services expenses, depreciation expenses, and transfer expenses in the budget realization report. The error correction accounting system records corrections of fixed asset and inventory values that affect equity. The restatement accounting system records corrections of fixed asset and inventory values in the balance sheet after corrections are made.

Keywords: Regional Financial Accounting System

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Teori.....	5
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	5
2. Konsep Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah.....	6
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7

4. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	10
5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	12
6. Efektivitas Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah	14
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	15
8. Kualitas Laporan Keuangan	15
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka pikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	27
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Alur Penyusunan Laporan Keuangan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang.....	43
Gambar 4.2 : Sistem Akuntansi Piutang Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.....	46
Gambar 4.3 : Sistem Akuntansi Persediaan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.....	48
Gambar 4.4 : Sistem Akuntansi Prosedur Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	50
Gambar 4.5 : Sistem Akuntansi Prosedur Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	52
Gambar 4.6 : Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.....	55
Gambar 4.7 : Sistem Akuntansi Beban Atau Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	57
Gambar 4.8 : Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang	60
Gambar 4.9 : Sistem Penyajian Kembali (Restamen) Neraca Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.....	62
Gambar 4.10: Siklus Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintahan yang ada di setiap Negara baik itu Negara berkembang maupun Negara maju pastilah dituntut untuk menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang semakin membaik disetiap tahunnya termasuk di Indonesia. Dalam hal ini ditekankan kepada pemerintahan yang *corporate governance*. Maka dari itu pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang sifatnya mengikat seluruh pemerintah daerah. Di dalam sistem pemerintahan daerah terdapat 2 substansi akuntansi yaitu. Satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD adalah sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, maka dari itu setiap SKPD diharuskan menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Maka pemerintah di haruskan terus melakukan uapaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis yang mencakup bidang peraturan kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas keuangan pemerintah pusat ,dan laporan keuangan pemerintah daerah .dalam rangka meningkatkan transparansi ,akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah serta peningkatan kualitas LKPP dan

LKPD ,SAP dinyatakan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah, ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu No 71 tahun 2010 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah No 24 tahun 2005 , standar akuntansi pemerintah dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dengan susunan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, SAP digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almanto Jayadi R (2017) menunjukkan bahwa penyusunan laporan operasional pada Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan operasional telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Kesesuaian hasil penelitian sebelumnya dengan peraturan pemerintah menunjukkan bahwa prosedur dan praktik akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, penelitian selanjutnya tetaplah penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan yang dapat dilakukan.

Maka hal tersebut yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan bagaimana penerapan sistem akuntansi keugan daerah terhadap kualitas laporan keuangan., hal ini hyang melatar belakangi peneliti untuk meneliti dengan judul . "TINJAUAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI

KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menambah informasi terkait dengan evaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah
- b. Menambah ilmu pengetahuan, dengan adanya teori-teori yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan yang dapat disajikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
- b. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mulyadi (2010:3) Mengatakan bahwa Akuntansi adalah organisasi formulasi, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan usaha pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan keuangan pemerintah.

Menurut Efrianti (2013 :30) Sistem akuntansi keuangan adalah serangkaian tahapan, prosedur, atau aturan dalam pengelolaan data keuangan daerah yang harus diikuti, baik itu mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Sedangkan menurut Halim (2012:35) bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dan entitas pemerintah daerah seperti kabupaten kota atau wilayah provinsi yang memerlukan, hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Halim tersebut dapat di jelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil

dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode disuatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:84) Mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem pengelolaan data *input* (masukan) adalah bukti- bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulasi dan *output* (keluaran) adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan diluar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Hall (2013), sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang dihubungkan bersama untuk melayani tujuan yang sama. Dan menurut Mulyadi (2016), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dikembangkan dalam suatu model yang terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan utama perusahaan.

Menurut James A. Hall (2017), sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berhubungan atau subsistem yang bekerja untuk tujuan yang sama. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem dikatakan sebagai subsistem jika dilihat dari hubungannya dengan sistem yang lebih besar dimana sistem tersebut hanya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar.

2. Konsep Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar informasi keuangan di lingkungan pemerintah adalah yang dapat diterima kebenarannya tanpa diuji sehingga standar akuntansi dapat diterapkan, antara lain:

1. Asumsi independensi entitas Unit pemerintah daerah, termasuk entitas pelapor dan entitas akuntansi, dianggap sebagai unit independen dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan untuk menghindari kebingungan dalam laporan keuangan lembaga pemerintah. Indikasi dari realisasi asumsi ini adalah bahwa entitas memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran secara bertanggung jawab. Entitas bertanggung jawab untuk mengelola aset dan sumber daya di luar neraca untuk memfasilitasi yurisdiksi fungsi utamanya, termasuk kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya tersebut di atas, hutang dan piutang karena keputusan entitas, dan jika rencana dilaksanakan
2. Penyusunan laporan keuangan berkelanjutan entitas mengasumsikan bahwa entitas akuntansi dan entitas akan terus ada. Oleh karena itu, misalkan pemerintah tidak bermaksud untuk melikuidasi entitas pelapor dalam jangka pendek.
3. Diukur dalam satuan mata uang Laporan keuangan entitas pelapor harus menyajikan setiap aktivitas yang diasumsikan dinilai dalam satuan mata uang. Hal ini diperlukan untuk analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memnuhi tujuannya. Sedangkan tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sedangkan menurut Iman Mulyana (2010:96) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama suatu periode.

Empat karakteristik berikut merupakan prasyarat bagi informasi keuangan pemerintah untuk mencapai kualitas yang diharapkan :

1. Relevansi

Jika laporan keuangan berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka, maka mereka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan relevan di masa lalu. . Oleh karena itu, informasi yang relevan dalam laporan keuangan mungkin terkait dengan tujuan penggunaannya. Informasi dianggap relevan jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Informasi akuntansi keuangan pemerintah yang lengkap disajikan selengkap mungkin, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Mengungkapkan secara jelas informasi di balik setiap informasi utama dalam laporan keuangan untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Handal

Informasi laporan keuangan tidak mengandung kesalahan besar atau menyesatkan, mencerminkan semua fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan merugikan mereka. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian wajar Informasi yang secara akurat menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang harus diungkapkan secara wajar
- b. Verifiability Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan jika pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya akan selalu mengarah pada kesimpulan yang tidak berbeda secara signifikan.

- c. Netralitas informasi berorientasi pada kebutuhan bersama dan tidak kondusif bagi kebutuhan pihak tertentu. Agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan (reliable), penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara komprehensif.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Mahmudi (2011:271), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. (SAP tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP berbasis akrual diterapkan dalam

lingkungan pemerintah pusat/ daerah , jika menurut peraturan perundang - undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah . PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran I PP No. 71 Tahun 2010. Manfaat standar akuntansi pemerintah Menurut Mahmudi (2011:271), sebagai berikut :

- a. Standar Akuntansi digunakan oleh akuntansi keuangan di pemerintah, sebagaimana diinstruksikan dalam persiapan dan penyajian gelar pemerintah.
- b. Standar Akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria pemeriksaan untuk menentukan apakah laporan keuangan tahunan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang diberikan.
- c. Standar akuntansi digunakan oleh sertifikat pengguna untuk memahami akun tahunan dan menghindari kesalahan saat menafsirkan informasi pada akhirnya.
- d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yaitu persatuan, banding, penyitaan, relevansi dan relevansi laporan keuangan.
- e. Standar Akuntansi adalah referensi dalam persiapan sistem akuntansi, karena masalah sistem akuntansi harus memenuhi standar akuntansi.

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disingkat SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan Indonesia. . Oleh karena itu, dengan standar ini, 12 laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil proses akuntansi harus dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Akuntansi publik menurut Rachmat (2010: 19) adalah suatu sistem pelaporan, penghitungan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pengkuantifikasian informasi keuangan, dengan fungsi pengendalian segala transaksi yang berkaitan dengan kepentingan negara dan kemanfaatan masyarakat. Prinsip-prinsip akuntansi dan laporan keuangan dirancang sebagai aturan untuk dipahami dan diikuti oleh pembuat standar dalam mengembangkan standar akuntansi, oleh penyedia informasi akuntansi dan keuangan, dalam kinerja kegiatan mereka, serta pengguna keuangan saja. pernyataan yang dibuat oleh pemerintah. laporan keuangan (Deddi Nordiawan 2012:132).

- a. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah akuntansi kas untuk mengakui pendapatan,

pengeluaran dan hibah dalam laporan kinerja anggaran dan akuntansi akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas di neraca.

- b. Prinsip nilai historis Aset diakui sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar aset yang dianggap diperoleh pada saat perolehan. Prinsip nilai historis lebih dapat diandalkan daripada metode penilaian lainnya karena lebih objektif dan dapat diverifikasi.
sulse.13
- c. Asas realisasi Penerimaan yang tersedia yang disahkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk mengganti hutang dan pengeluaran untuk periode tersebut.
- d. Substansial daripada prinsip formal Informasi yang dimaksudkan untuk mewakili transaksi atau peristiwa lain apa pun yang dimaksudkan untuk disajikan dengan jujur.
- e. Prinsip periodisitas Aktivitas akuntansi dan informasi keuangan entitas pelapor harus dipecah menjadi periode pelaporan untuk mengukur kinerja entitas dan menentukan lokasi sumber dayanya.
- f. Prinsip konsistensi Metode akuntansi yang sama diterapkan oleh entitas yang menyajikan laporan keuangan untuk peristiwa serupa antar periode. Ini tidak berarti bahwa tidak boleh ada perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya.
- g. Prinsip Pengungkapan Penuh Laporan keuangan memberikan informasi yang komprehensif yang dibutuhkan pengguna. Informasi ini dapat ditempatkan pada sampul laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

- h. Prinsip Penyajian Wajar Unsur-unsur yang memerlukan pertimbangan yang baik bagi penyusun laporan keuangan diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian ini diidentifikasi dengan mengungkapkan sifat dan luasnya dengan menggunakan pertimbangan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan (Nondiawan, 2012:132).

Menurut Mahmudi (2013), sistem akuntansi pemerintah meliputi sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). Sistem akuntansi pemerintah berbeda dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) tetapi keduanya terkait. Standar akuntansi adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk memandu penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi menentukan output yang diharapkan, sedangkan sistem akuntansi adalah sarana atau teknologi untuk menghasilkan output sesuai dengan standar akuntansi

6. Efektivitas Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah

Robert & Vijay (2005: 174) dalam Nurlaila (2014: 31) menyatakan bahwa efisiensi ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh tanggung jawab pusat dan tujuannya. Suatu sistem dikatakan efektif jika hasil kerja seseorang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif apabila tujuan yang dicapai oleh badan pemerintah sesuai dengan harapan. Tujuan penerapan standar akuntansi pemerintah adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan akuntansi pemerintah.

7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

8. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Permadi (2013:49), laporan keuangan adalah laporan keuangan suatu organisasi ekonomi yang disusun secara sistematis pada akhir periode oleh akuntansi atau catatan yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan. waktu. Pada dasarnya, laporan keuangan harus memiliki informasi yang berkualitas atau karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi kepada pengguna, seperti:

a. Dapat dimengerti.

Kualitas informasi yang penting dalam laporan keuangan adalah bahwa informasi tersebut segera dipahami oleh pengguna (IAI, dikutip dalam Harahap, 2012: 130).

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. (IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).

c. Keandalan.

Agar berguna, informasi juga harus dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari salah saji, salah saji material, dan dapat dianggap oleh pengguna sebagai representasi sejati dari apa yang diklaimnya atau dapat diharapkan secara wajar disajikan. (IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).

d. Bisa dibandingkan.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang sebanding adalah bahwa pengguna harus disadarkan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan perubahan metode tersebut dan dampak dari perubahan tersebut. (IAI, dikutip dalam harahap, 2012: 130).

Laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan organisasi.

Pengertian kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seberapa baik atau buruk sesuatu itu; kualifikasi atau kualifikasi (kecerdasan, keterampilan, dll.); kualitas. Berdasarkan pengertian tersebut, kualitas adalah evaluasi dari hasil pekerjaan yang sebenarnya dilakukan dan dapat dijelaskan kepada semua pihak yang berkepentingan.¹⁶ 1. Hambatan pelaporan Laporan keuangan yang berkualitas Menurut Mardiasmo (2009: 144) Akuntansi sektor publik dikembangkan untuk memperbaiki praktik yang ada saat ini . Hal ini mencakup upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik, terutama yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal. Namun, ada beberapa kendala yang sering dihadapi akuntan sektor publik dalam menghasilkan laporan keuangan yang konsisten dan andal, di antaranya :

- a. Objektivitas, yaitu adanya pertentangan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pihak terkait.
- b. Keterpaduan, yaitu agar tidak terjadi fragmentasi dalam penilaian kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka diperlukan konsistensi dalam penerapan metode akuntansi.
- c. Komparabilitas, yaitu semakin objektif laporan keuangan, semakin tinggi komparabilitasnya, karena laporan yang berbeda dapat dihasilkan atas dasar yang sama
- d. Relevansi tepat waktu dengan periode waktu organisasi yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan.
- e. Penghematan pelaporan untuk biaya penyajian laporan keuangan.
- f. Materialitas, khususnya jika mempengaruhi keputusan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan sumber kredit yang digunakan (Hery, 2013:26). SFAC No.1 Menjelaskan tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba seperti:

- a. Untuk memberikan informasi yang berguna kepada investor, kreditur dan pengguna untuk membuat keputusan mengenai investasi, kredit dan lain-lain.
- b. Memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam menentukan jumlah, waktu dan prospek arus kas masuk dari dividen atau bunga ekuitas serta hasil penjualan, piutang atau saham dan pinjaman yang terutang.

- c. Memberikan informasi tentang sumber daya (aset), aset perusahaan dan pengaruh transaksi, peristiwa dan keadaan lain pada aset dan kewajiban.
- d. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu.
- e. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan membelanjakan uang, pinjaman dan pengembalian, pada transaksi yang mempengaruhi modal, termasuk dividen.
- f. Pembayaran lain kepada pemilik dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas bisnis
- g. Memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola bisnis manajemen bisnis kepada pemilik pengguna sumber daya (properti) yang dipercayakan kepada mereka.
- h. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik usaha (Hery, 2013: 2)

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, terdapat tujuh laporan keuangan utama, yaitu: Laporan Kinerja Anggaran (LRA), yang menyajikan gambaran umum tentang sumber, lokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan yang sama. Unsur-unsur yang disebutkan langsung dalam laporan kinerja anggaran adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pendanaan LRA. Laporan Perkembangan Surplus Anggaran (Laporan Kemajuan SAL) memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan saldo anggaran pada tahun referensi

dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca adalah pernyataan yang disiapkan secara sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada titik waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelapor dalam kaitannya dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.¹⁹ Statement of Operations (LO) memberikan gambaran tentang sumber daya ekonomi yang meningkatkan dana . pemerataan dan pemanfaatannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan selama periode acuan. Item yang termasuk langsung dalam laporan operasi adalah pendapatan LO, pengeluaran, transfer, dan outlier. Laporan arus kas (LAK) menyajikan informasi kas terkait dengan aktivitas pendanaan dan investasi ke depan yang menggambarkan saldo awal pemerintah pusat, pendapatan pengeluaran, dan saldo kas penutupan./lokal untuk suatu periode waktu tertentu. Item yang termasuk dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun referensi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang pengungkapannya disyaratkan dan direkomendasikan dalam SAP dan pernyataan yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengharuskan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban kinerja APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Mereka disusun

oleh komite standar akuntansi pemerintah yang independen dan ditentukan oleh peraturan pemerintah setelah peninjauan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum untuk tujuan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian Eka Danofi (2013:80) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, maka laporan keuangan akan semakin baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dan juga melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan peraturan nomor Permendari. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang termasuk dalam kumpulan laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, pengeluaran menurut klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus sebagai laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran yang disusun secara akrual. Laporan fluktuasi resin anggaran yang melebihi

- b. Laporan fluktuasi saldo anggaran (LPSAL) yang melebihi resin anggaran sebelumnya (saldo tahun sebelumnya), penggunaan resin anggaran berlebih, dan saldo kelebihan/kurang anggaran saat ini (SILPA/SIKPA) Display . Tahun, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dll, dan saldo anggaran terbaru untuk periode berjalan. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan gambaran perimbangan anggaran dan penggunaan pembiayaan pemerintah sehingga perusahaan pelapor dapat memberikan tambahan rincian unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam perbedaan komentar laporan keuangan.
- c. Laporan Operasi 9 Laporan Operasi mencerminkan pendapatan, beban, dan surplus/defisit LO perusahaan pelapor yang memberikan informasi tentang seluruh aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan pelapor dibandingkan periode-periode sebelumnya.
- d. Tabel Perubahan Modal Tabel Perubahan Modal menunjukkan perubahan bahwa setidaknya modal tahun sebelumnya atau modal tahun sebelumnya secara langsung menambah / mengurangi surplus / defisit LO dan modal untuk periode tersebut. Dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan Dasar.
- e. Neraca Neraca adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan modal sendiri tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas Laporan arus kas berupa laporan keuangan yang menampilkan informasi kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, transaksi pembiayaan dan non anggaran, dengan saldo awal pusat/daerah, pendapatan, pengeluaran, dan saya akan menjelaskan saldo pada akhir periode. Uang pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

- g. Anotasi Laporan Keuangan Anotasi laporan keuangan mencakup deskripsi numerik dan rincian yang muncul pada laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmat (2010:33), ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

- a. Basis of Accounts (Basis Akuntansi) Basis akun yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk mengukur pendapatan, pengeluaran dan pendanaan dalam laporan pelaksanaan anggaran. Artinya pendapatan diakui pada saat penerimaan kas di Kas Umum/Perbendaharaan Daerah. Akun atau oleh entitas. Pada saat yang sama, pengeluaran diakui sebagai beban pada saat kas ditransfer dari rekening kas umum/daerah atau entitas pelapor. Entitas pelapor tidak menggunakan pengembalian ke depan. Penentuan sisa dana anggaran (kurang lebih) untuk setiap periode tergantung pada selisih antara realisasi pendapatan dan pengeluaran Pendapatan dan pengeluaran kas seperti bantuan luar negeri berupa barang dan jasa yang disajikan dalam laporan pelaksanaan anggaran. Akuntansi akrual laporan keuangan pemerintah digunakan untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan diakui pada saat transaksi terjadi atau ketika peristiwa atau kondisi lingkungan mempengaruhi keuangan publik, kapan pun kas atau setara kas diterima, atau dibayarkan.
- b. Biaya perolehan Aset diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar aset yang dianggap diperoleh pada saat perolehan. Kewajiban diakui pada jumlah dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban masa depan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada metode penilaian lainnya karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dengan tidak adanya nilai historis, nilai wajar aset atau liabilitas yang bersangkutan dapat digunakan.

- c. Asas-asas pelaksanaan Bagi pemerintah, pendapatan yang dapat dibelanjakan yang disahkan oleh anggaran pemerintah untuk satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan pengeluaran untuk periode tersebut. penurunan arus kas.
- d. Prinsip substantif daripada bentuk Informasi dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan, sehingga transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan kenyataan dan kenyataan ekonomi, bukan hanya formalitas. Jika substansi suatu transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dari penampilannya, hal ini harus tercermin dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Prinsip periodisitas Aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelapor harus dibagi ke dalam periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan lokasi sumber dayanya tersedia. Jangka waktu utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan setengah tahunan juga direkomendasikan.
- f. Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan oleh entitas pelapor terhadap peristiwa serupa antar periode (prinsip konsistensi internal). Ini tidak berarti bahwa beralih dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya dilarang. Metode akuntansi yang

digunakan dapat berubah asalkan metode baru digunakan untuk memberikan informasi yang lebih baik daripada yang lama.

- g. Prinsip Pengungkapan Penuh Laporan keuangan memberikan informasi yang komprehensif yang dibutuhkan pengguna Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat dicantumkan pada sampul laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
- h. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan memberikan representasi yang benar dari laporan anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan yang menyertainya. Ketidakpastian diakui dengan menyatakan sifat dan luas penggunaan pertimbangan yang baik dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian yang baik mengandung unsur kehati-hatian ketika melakukan peramalan dalam kondisi yang tidak pasti sehingga aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban tidak dinilai terlalu rendah. Namun, penggunaan penilaian yang baik tidak memungkinkan, misalnya, pembentukan pendapatan atau cadangan aset. , atau dengan sengaja mencatat kewajiban atau pengeluaran yang sangat tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan.

9. Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Siklus akuntansi merupakan tahapan/langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 Langkah, yaitu:

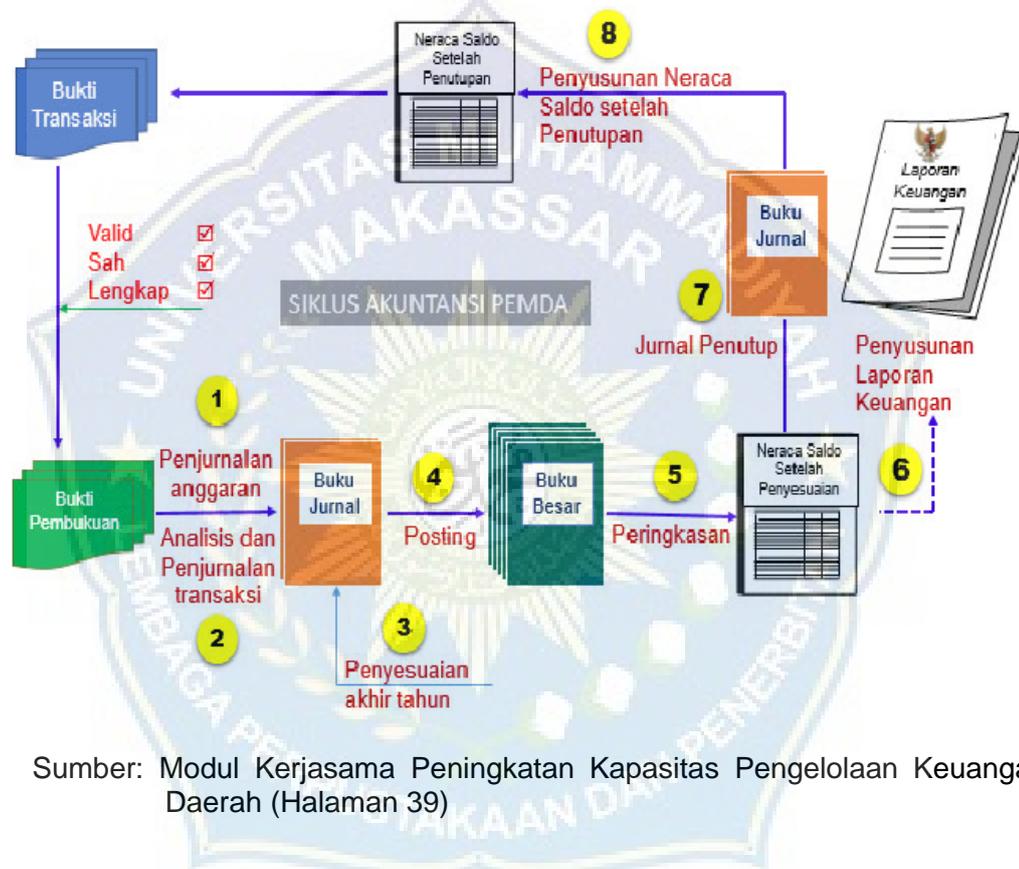
- a. Pencatatan Jurnal LRA dan Saldo Awal di Buku Jurnal
- b. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal

- 1) Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur dalam Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5 yaitu rincian objek.
- 2) Penjurnalan dibedakan menjadi
 - a) Jurnal Financial (LO & Neraca): Secara default seluruh transaksi dicatat/ dibuat jurnal finansialnya (LO & Neraca) dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset ,2-Kewajiban,3- Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban.
 - b) Jurnal Anggaran (LRA): Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran.
 - c. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial (LO & Neraca) saja yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban.
 - d. Posting ke Buku Besar
 - e. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan:
 - 1) Laporan Operasional
 - 2) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan Realisasi Anggaran

- 5) Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal
- 6) Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Adapun urutan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1: Alur Penyusunan Laporan Keuangan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber: Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Halaman 39)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat

melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sri Widati, Irda Wati (2019)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara	Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kab. Konawe telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2	Dewi Ratnasari (2019)	Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng belum maksimal dalam menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hal tersebut terkait dengan sistem pencatatan transaksi masih ada beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan tanggal kejadiannya
3	Dewi	Analisis penerapan	Jenis penelitian	Hasil penelitian

	Murhannah Pratiwi (2020)	sistem akuntansi keuangan pada badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang	yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	disimpulkan bahwa Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten enrekang secara umum telah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi berbasis akrual
4	Titi Fahsani (2020)	Analisis akuntansi keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang	Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan telah sesuai dan mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual. Hal ini BAPPEDA Enrekang telah menetapkan sistem berbasis akrual pada tahun 2017 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
5	Moch Fajar Arif Trianto (2018)	Evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan dan standar Akuntansi pemerintah dalam pelaporan keuangan badan layanan umum daerah (studi kasus RSUD Bangil kabupaten pasuruan)	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan belum tercapai maksimal, meskipun penyusunan laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi yang berlaku. Ada beberapa hal yang dilaksanakan secara maksimal: 1) sistem akuntansi; 2) pengendalian internal. Kendala yang ditemukan selama

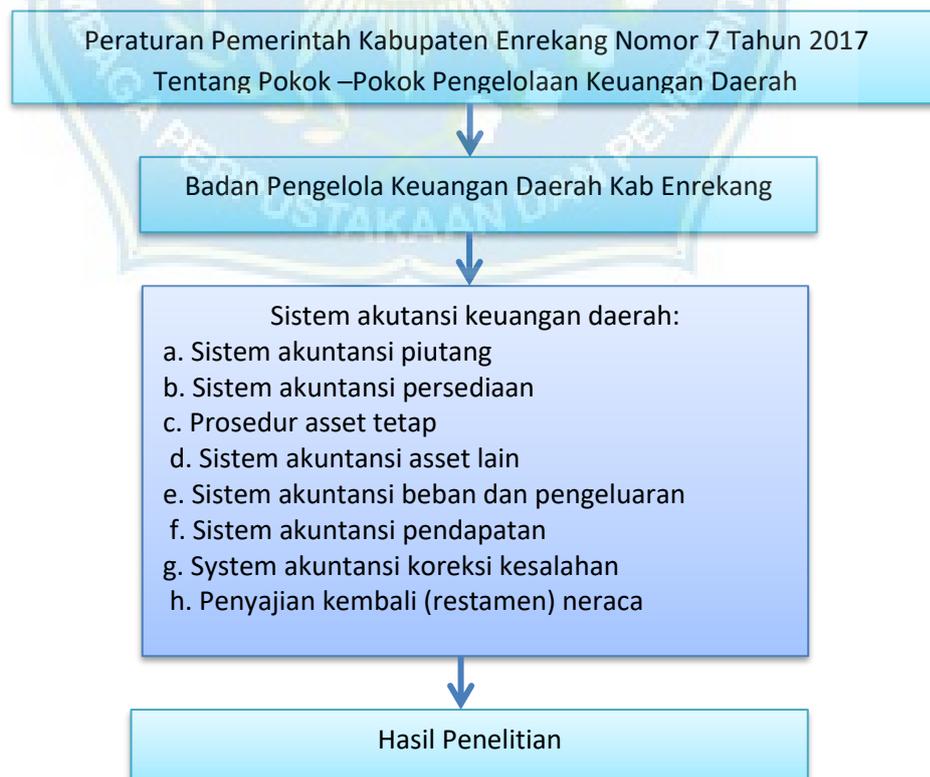
				<p>implementasinya yaitu belum adanya sistem akuntansi biaya sehingga perhitungan anggaran masih berdasarkan estimasi; dan kurangnya kemampuan SDM dalam memahami sistem akuntansi sehingga pelaksanaan sistem pelaporan keuangan belum maksimal. Secara keseluruhan penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan BLUD sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p>
6	Nurul Fahmi (2018)	<p>Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel yaitu $2,371 > 2,048$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,025</p>

				(0,02<0,05). Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
7	Almanto Jayadi R (2017)	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan operasional pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten enrekang	Metode analisis deskriptif (deskriptif analisis Method)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan operasional pada dinas pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang telah sesuai dengan PSAP No.12 tentang laporan operasional yang berbasis Akrual.
8	Nur Amalia Vega (2021)	Efektivitas standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara	Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa
9	Tutun Hermawanto Botutihe (2013)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Koefisien determined menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

				kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo sebesar 80.6%
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Untuk dapat menyusun laporan keuangan diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Publik di suatu negara akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang terjadi dilapangan dan memberikan penjelasan secara konkret tentang bagaimana keadaan sebenarnya daripada objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Jl.Jenderal Sudirman No. 1 penelitian ini berfokus pada Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data pada penelitian dilakukan selama Dua bulan

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai hal yang akan

diteliti.observasi atau pengamatan langsung dilakukan di kantor badan pendapat daerah Kabupaten Enrekang.dengan melakukan pencatatan hasil observasi secara sistematis

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara secara langsung yang memang mengerti dan paham mengenai persoalan yang akan diteliti .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti yang mendukung penelitian.dimana dokumentasi merupakan data fisik berupa bentuk foto yang digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara.Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber .sedangkan dokumen untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan evaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada badan pengelolah keuangan daerah.

D. Metode Analisis Data

Salah satu cara yang digunakan dalam proses pengabsahan data hasil penelitian adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.

1. Triangulasi sumber

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara. Mem

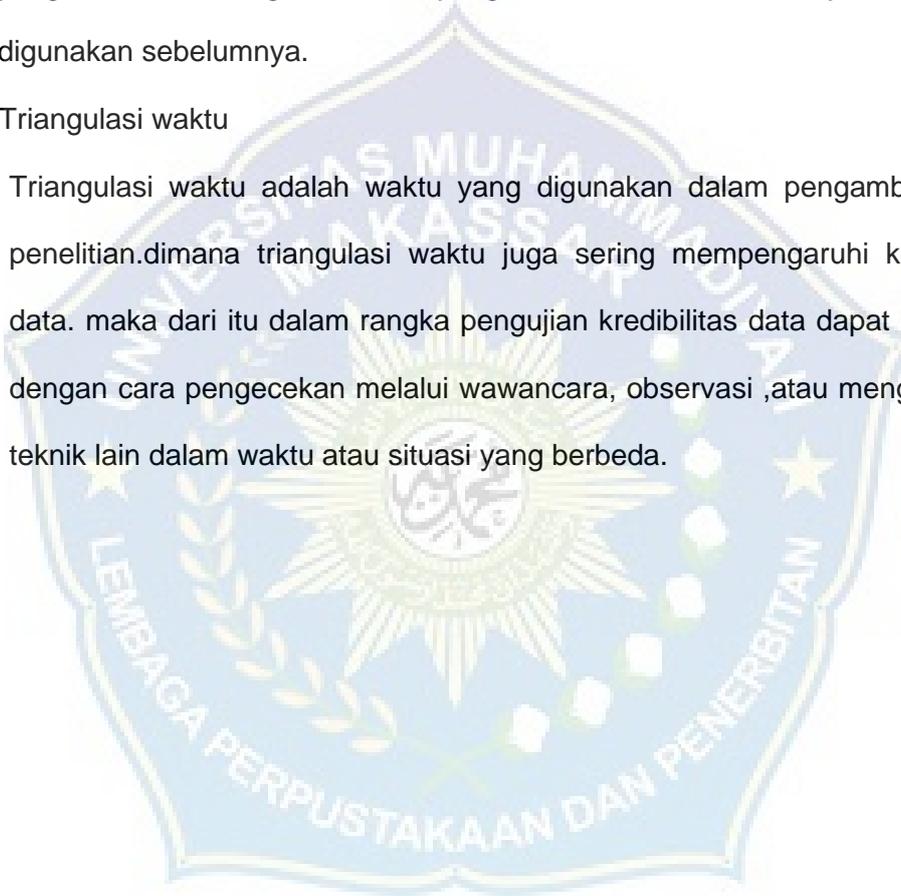
bandingkan informasi dari sumber lain dengan informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi metode yang digunakan untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode untuk pengumpulan teknik yang berbeda dengan teknik yang sudah ada sebelumnya atau yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah waktu yang digunakan dalam pengambilan data penelitian. dimana triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. maka dari itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi, atau menggunakan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Dalam usaha mempercepat pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Pengelolaan administrasi publik dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan kebutuhan mendesak, seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dan perkembangan dinamika pelayanan publik, serta tuntutan untuk menuntut terciptanya pemerintahan yang lebih sensitif, transparan, dan akuntabel. Berusaha memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan efisiensi operasional pemerintah daerah.

Salah satu lembaga pemerintahan Kabupaten Enrekang yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Enrekang. Dasar pemikiran dari sebelumnya adalah sehubungan dengan semakin kompleksnya tugas pengelolaan keuangan daerah, maka bagian keuangan sekretariat daerah telah membentuk organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Hal ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Enrekang dan keputusan Bupati Enrekang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang terkait peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut dilakukan perubahan kembali terhadap OPD Di Kabupaten Enrekang sehingga Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang termasuk dalam peraturan daerah ini melebur Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Bagian Aset Sekretariat Daerah menjadibagian dari struktur/susunan organisasi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Pada tahun 2016, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Mesin Daerah, yang disusul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlakunya peraturan ini, maka lembaga daerah di Kabupaten Enrekang mengalami perubahan, termasuk Otoritas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kembali ke Otoritas Perilaku Keuangan Daerah. Perubahan ini berdampak pada perluasan Otoritas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah menjadi tiga organisasi lembaga daerah: Badan Pengelola Properti dan

Keuangan Daerah (BKAD), Badan Pengelola Properti dan Keuangan Daerah (BAPENDA), dan sekretariat daerah yang khusus menangani sektor properti. kembali menjadi bagiannya dan pada tanggal 1 Januari 2021 namanya diubah menjadi Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi BPKD Kabupaten Enrekang :

"Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi, dan akuntabel, untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman, dan sejahtera".

b. Misi BPKD Kabupaten Enrekang :

- 1) Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
- 2) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan sumber daya aparatur penata usaha keuangan dan aset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi

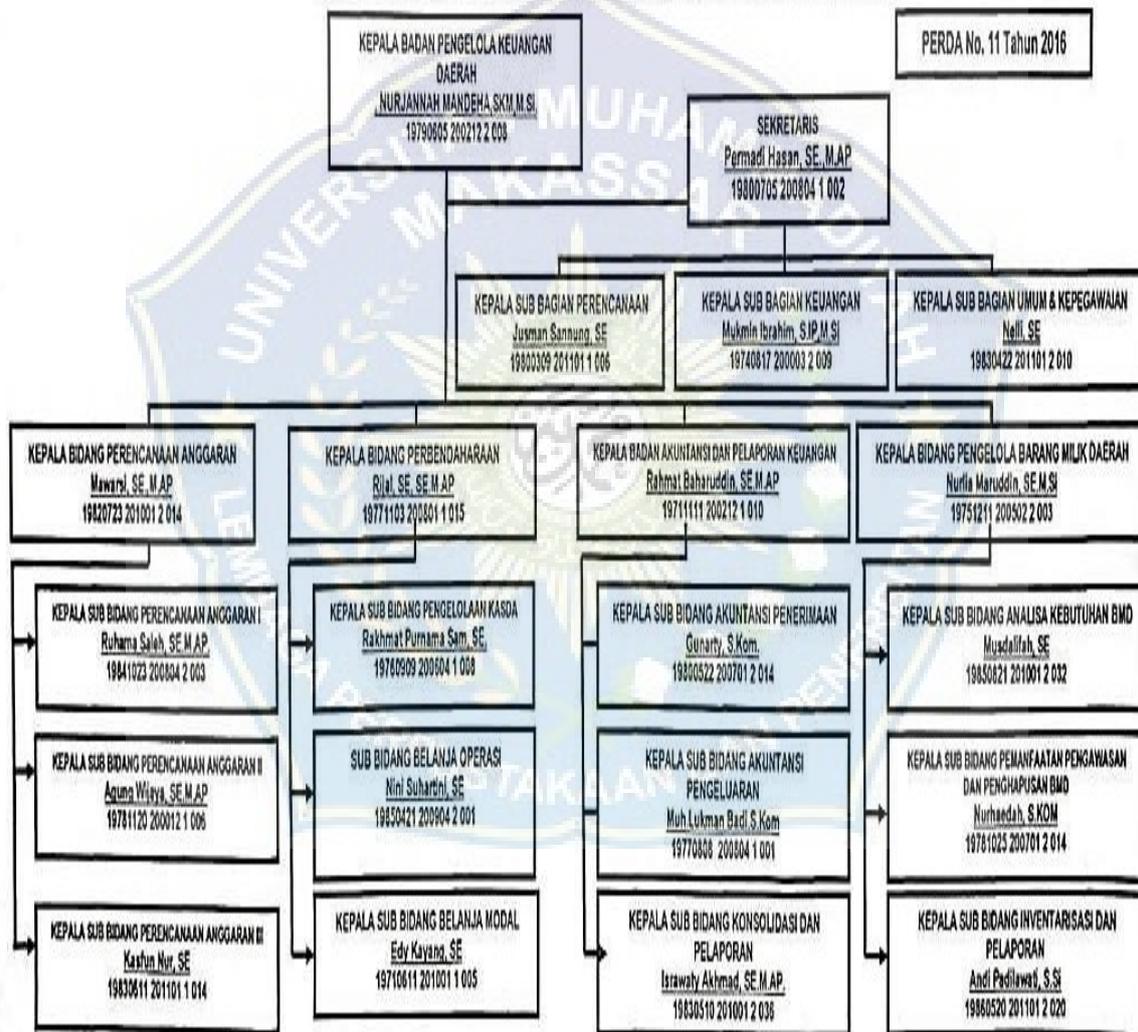
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 tahun 2016 mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja, Untuk memperjelas pembagian kerja salam SKPD sehingga disusun struktur organisasi sebagai berikut:



DEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(B P K D)

Jalan Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0420) 21086 Fax. 21921
ENREKANG 91712

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG



Gambar 4.1: Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang

B. Hasil Penelitian

Untuk dapat menyusun laporan keuangan diperlukan suatu standar akuntansi. Penerapan Standar Akuntansi Publik di suatu negara akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017 tentang pokok –pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 8 indikator penting:

1. Sistem akuntansi piutang
2. Sistem akuntansi persediaan
3. Prosedur asset tetap
4. Sistem akuntansi asset lain
5. Sistem akuntansi beban dan pengeluaran
6. Sistem akuntansi pendapatan
7. Sistem akuntansi koreksi kesalahan
8. Penyajian kembali (restamen) neraca

Berikut hasil wawancara terhadap 8 indikator sistem akuntansi keuangan daerah, berdasarkan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017.

1. Sistem Akuntansi Piutang

Piutang merupakan jumlah yang harus dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau otonomi daerah, yang dapat diperkirakan dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan atau akibat lain berdasarkan peraturan yang sah sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan Sistem akuntansi piutang yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi piutang itu meliputi pencatatan dalam hal ini transaksi/kejadian piutang kemudian ada pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan terhadap nilai dari piutang”.(Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi piutang yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017 dimana dilakukan pencatatan tentang transaksi atau kejadian piutang, selain itu ada pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan terhadap nilai dari piutang.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan neraca Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa piutang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam neraca yang terdapat pada aset lancar (Gambar 4.2).

Gambar 4.2 : Sistem Akuntansi Piutang Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

ASET			
1	ASET	18,262,486,467.81	18,267,076,038.70
1.1	ASET LANCAR	1,277,541.67	1,913,528.00
1.1.1	Kas dan Setara Kas	0.00	0.00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
1.1.3	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
1.1.4	Piutang Lainnya	0.00	0.00
1.1.5	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	676,041.67	949,128.00
1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka	676,041.67	949,128.00
1.1.6.03.01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	676,041.67	949,128.00
1.1.7	Persediaan	601,500.00	964,400.00
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakas Habis	601,500.00	964,400.00
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	601,500.00	964,400.00
1.1.8	Aset Untuk Dikonversi	0.00	0.00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
1.3	ASET TETAP	17,562,182,552.81	17,655,159,177.37
1.3.1	Tanah	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	3,290,636,116.00	3,149,506,791.00

Sumber : Laporan Neraca BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi piutang yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana semua transaksi piutang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan neraca yang terdapat pada aset lancar.

Jumlah piutang/ aset yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.18.262.486.467 terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka

panjang, piutang pendapatan, piutang lainnya, beban dibayar dimuka, beban jasa dibayar dimuka.

- Aset lancar = Rp.1.277.541
- Beban dibayar di muka = Rp.676.041
- Beban jasa dibayar di muka = Rp.676.041

2. Sistem Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah harta lancar yang berupa barang atau perlengkapan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan barang yang dijual dan/atau disediakan sebagai bagian dari pelayanan umum terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan Sistem akuntansi persediaan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan dari sistem akuntansi persediaan itu meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan, ada beberapa pihak yang terkait dengan hal tersebut, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan kemudian ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD”.(Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi persediaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, dimana pelaksanaan dari sistem akuntansi persediaan itu meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan

neraca Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi persediaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam neraca yang terdapat pada aset lancar, (Gambar 4.3).

Gambar 4.3 : Sistem Akuntansi Persediaan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

1 1 7	Persediaan	601,500.00	964,400.00
1 1 7 01	Persediaan Bahan Pakai Habis	601,500.00	964,400.00
1 1 7 01 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	601,500.00	964,400.00
1 1 8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0.00	0.00

Sumber : Laporan Neraca BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi persediaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan persediaan dilakukan pada laporan neraca yang terdapat pada aset lancar.

Persediaan merupakan bagian dari piutang.yang disajikan dalam laporan neraca. Jumlah persediaan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.601.500 terdiri dari persediaan beban pakai habis yang dimaksud dalam laporan neraca tersebut adalah persediaan alat tulis kantor.

- Persediaan alat tulis kantor = Rp.601.500

3. Sistem Akuntansi Prosedur Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan Sistem akuntansi persediaan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi aset tetap itu adalah bangunan yang memiliki manfaat dan harus lebih dari 12 bulan untuk digunakan, dalam hal ini digunakan dalam kegiatan pemerintah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. seperti, Kantor SKPD, Tanah, gedung, bangunan ada juga mesin dan peralatan. Kita juga menjumlahkan akumulasi dari nilai penyusutan aset tetap tersebut. Jadi ada namanya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Jadi prosedur akuntansi aset tetap, tulang punggungnya ada di PPK-SKPD”. (Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi prosedur aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, dimana pelaksanaan dari sistem akuntansi prosedur aset tetap itu meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset tetap, seperti; tanah, gedung, bangunan, mesin, dan peralatan. serta nilai dari penyusutan setiap aset tetap tersebut.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan neraca Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi prosedur aset tetap Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam neraca, dimana didalam aset tetap dicatatkan semua aset tetap dan penyusutan dari aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (Gambar 4.4).

Gambar 4.4 : Sistem Akuntansi Prosedur Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

ASET TETAP		17,655,159,177,37	19,601,521,326,54
1	Tanah	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
1 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
1 11 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	6,278,902,000.00	6,278,902,000.00
2	Peralatan dan Mesin	3,149,506,791.00	3,295,030,542.00
2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	1,685,895,029.00	1,701,667,029.00
2 04 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	1,685,895,029.00	1,701,667,029.00
2 15	Alat Rumah Tangga	1,455,094,962.00	1,584,846,513.00
2 15 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,455,094,962.00	1,584,846,513.00
18	Alat Studio	8,516,800.00	8,516,800.00
18 01	Peralatan Studio Visual	8,516,800.00	8,516,800.00
	Gedung dan Bangunan	13,059,177,776.90	14,830,242,776.90
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	13,059,177,776.90	14,830,242,776.90
01 01	Bangunan Gedung Kantor	13,059,177,776.90	14,830,242,776.90
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8,500,000.00	8,500,000.00
01	Jalan	8,500,000.00	8,500,000.00
01	Jalan	8,500,000.00	8,500,000.00
1 01 03	Jalan Kabupaten/Kota	8,500,000.00	8,500,000.00
2	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(4,811,133,782.38)	(4,275,360,852.65)
7 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,537,163,264.29)	(4,262,545,256.65)
7 01 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Ber	0.00	(12,835,596.00)
7 01 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	0.00	0.00
7 01 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(47,464,290.00)	0.00
7 01 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(1,200,000.00)	0.00
7 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(273,565,518.09)	0.00
7 02 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Temp	(273,565,518.09)	0.00
7 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(425,000.00)	0.00
7 03 22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(425,000.00)	0.00

Sumber : Laporan Neraca BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi prosedur aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan aset tetap dilakukan pada laporan neraca yang dicatatkan semua aset tetap yang terdiri dari; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan serta aset tetap lainnya. selain itu penyusutan dari aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang juga dicatatkan.

Aset tetap merupakan bagian dari piutang yang disajikan dalam laporan neraca. Jumlah aset tetap yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.655.159.177 terdiri dari tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, alat rumah tangga, peralatan studio, gedung dan bangunan, jalan dan akumulasi penyusutan.

- Tanah dan bangunan = Rp.6.278.902.000
- Peralatan dan mesin = Rp.3.149.506.791
- Alat rumah tangga = Rp.1.455.094.962
- Peralatan studio = Rp.8.516.800
- Gedung dan bangunan = Rp.13.059.177.776
- Jalan = Rp.8.500.000
- Akumulasi penyusutan = (Rp.4.811.153.782)

4. Sistem Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan Sistem akuntansi aset lainnya yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Iya ada dek, kalau sistemnya itu kita mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. dimana yang termasuk di dalamnya aset tak berwujud, kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. ada

juga tagihan penjualan angsuran, penyisihan tagihan penjualan dan angsuran tuntutan ganti rugi juga bagian dari itu.”.(Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi aset lainnya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, dimana pelaksanaan dari sistem akuntansi prosedur aset lainnya itu meliputi; aset tak berwujud, kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. ada juga tagihan penjualan angsuran, penyisihan tagihan penjualan dan angsuran tuntutan ganti rugi.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan neraca Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi prosedur aset lainnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam neraca, dimana didalam aset lainnya dicatatkan tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lai-lain yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (Gambar 4.5).

Gambar 4.5 : Sistem Akuntansi Prosedur Aset Lainnya Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

1	Dana Cadangan	610,003,333.33	549,607,000.00
	ASET LAINNYA		
		0.00	0.00
1	Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	590,498,333.33	525,470,000.00
3	Aset Tidak Berwujud	1,678,570,000.00	1,479,470,000.00
3 05	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1,078,571,000.00	1,479,470,000.00
3 05 01	Software	(1,088,071,666.67)	(954,000,000.00)
3 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1,088,071,666.67)	(954,000,000.00)
3 06 05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lai	19,505,000.00	24,137,000.00
4	Aset Lain-lain	19,505,000.00	24,137,000.00
4 01	Aset Lain-lain	19,505,000.00	24,137,000.00
4 01 01	Aset Lain-lain	19,505,000.00	24,137,000.00

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi prosedur aset lainnya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan aset lainnya pada laporan neraca yang dicatatkan semua aset lainnya yang terdiri dari; tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Aset lainnya merupakan bagian dari piutang yang disajikan dalam laporan neraca. Jumlah aset tetap yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.610.003.333 terdiri dari tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, akumulasi amortasi aset tidak berwujud, aset lain-lain.

- Tagihan jangka panjang = Rp.0
- Kemitraan pihak ketiga = Rp.0
- Aset tidak berwujud = Rp.590.498.333
- Aset tidak berwujud lain = Rp.1.678.570.000
- Akumulasi amortasi = (Rp.1.088.071.666)
- Aset lain-lain = Rp.19.505.000

5. Sistem Akuntansi Pendapatan

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau untuk sistem akuntansi pendapatan itu disusun dalam laporan operasional, dimana pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah seperti; pajak daerah, retribusi daerah, ada juga pendapatan transfer, transfer dari pemerintah pusat atau dana dan pendapatan lain yang sah”.(Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, dimana pelaksanaan dari sistem akuntansi pendapatan disusun dalam laporan operasional, dimana pendapatan meliputi; pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah seperti; pajak daerah, retribusi daerah, ada juga pendapatan transfer, transfer dari pemerintah pusat atau dana dan pendapatan lain yang sah.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan operasional, dimana didalam pos pendapatan dirincikan jumlah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang sah (Gambar 4.6).

Gambar 4.6 : Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Page 1 of 3

KUN	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
KEGIATAN OPERASI			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00
2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan pendapatan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang dianggap sah semuanya sudah dicatatkan pada pos pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Pendapatan merupakan bagian dari laporan realisasi APBD. Jumlah pendapatan yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp.0
- Pendapatan transfer = Rp.0
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah = Rp.0

6. Sistem Akuntansi Beban

Akuntansi beban pada lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan sistem akuntansi beban atau belanja yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi kalau berbicara mengenai sistem akuntansi beban pada lingkup BPKD, beban itu sama dengan belanja, melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium, beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban murni akrual, dan juga belanja tidak terduga. Untuk beban dan belanja itu disajikan di laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dilaporan tersebut secara rinci mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh BPKD untuk menjalankan pelayanan”. (Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi beban yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten

Enrekang nomor 7 tahun 2017, dimana pelaksanaan dari sistem akuntansi beban atau belanja disajikan dalam laporan operasional, dimana beban atau belanja meliputi; pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium, beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban murni akrual, dan juga belanja tidak terduga.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi beban atau belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan operasional, dimana didalam aset lainnya dicatatkan tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (Gambar 4.7).

Gambar 4.7 : Sistem Akuntansi Beban Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

	BEBAN OPERASI - LO	18.568.471.271,79	32.191.408.528,06
	Beban Pegawai - LO	13.391.246.515,00	22.638.843.354,00
	Beban Barang dan Jasa	4.179.378.433,33	7.631.368.890,00
0	Beban Persediaan	1.147.602.425,00	2.339.148.137,00
0	Beban Jasa	1.466.912.729,00	2.134.647.023,00
0	Beban Perjalanan	1.542.738.643,00	3.113.417.513,00
0	Beban Pemeliharaan	22.124.586,33	44.156.217,00
9 1 3	Beban Bunga	0,00	0,00
9 1 4	Beban Subsidi	0,00	0,00
9 1 5	Beban Hibah	0,00	0,00
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	690.396.323,46	1.495.451.284,06
9 1 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9 1 9	Beban Lain-lain	307.450.000,00	425.745.000,00
9 2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
9 2 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
9 2 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
9 2 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
9 2 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00
9 2 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
9 2 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	18.568.471.271,79	32.191.408.528,06

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi beban yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan beban atau belanja pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana belanja operasional yang terdiri atas; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibaj, belanja bantuan sosial, belanja hasil bagi pajak dan retribusi, Selain itu dicatatkan juga belanja modal. Semuanya sudah dicatatkan pada pos belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Beban merupakan bagian dari laporan realisasi APBD. Jumlah beban BPKD Kabupaten Enrekang yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.18.568.471.271 terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan, beban lai-lain dan beban transfer.

- Beban pegawai = Rp.13.391.246.515
- Beban barang dan Jasa = Rp.4.179.378.433
- Beban penyusutan = Rp.690.396.323
- Beban lain-lain = Rp.307.450.000
- Beban transfer = Rp.0

7. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
- b. Kesalahan perhitungan matematis,
- c. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
- d. Kesalahan interpretasi fakta,
- e. Kecurangan, atau
- f. Kelalaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan sistem akuntansi koreksi kesalahan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Iya biasa terjadi, mungkin karena capek, kurang istirahat jadi biasa salah input. tapi kan itu kita koreksi kembali atau betulkan kembali. jadi istilah koreksi disini adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan, misalnya ada koreksi koreksi salah pencatatan utang belanja, koreksi pencatatan aset. dan lain-lain”. (Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi koreksi kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, Koreksi dilakukan dengan cara pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan, misalnya ada koreksi koreksi salah pencatatan utang belanja, koreksi pencatatan aset. dan lain-lain.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi koreksi kesalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan perubahan ekuitas, dimana terdapat koreksi

nilai aset tetap, koreksi nilai investasi dan koreksi nilai persediaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (Gambar 4.8).

Gambar 4.8 : Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

Page 1 of 1

RAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
EKUITAS AWAL	20,140,227,749.54	21,331,609,839.25
PERPLUS/DEFISIT-LO	(15,517,327,140.27)	(16,674,081,387.79)
IMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
(RK-PPKD) EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15,093,964,403.00	15,808,689,676.00
Koreksi Nilai Aset Tetap	(1,966,308,551.00)	(422,714,802.00)
Koreksi Nilai Investasi	0.00	(900,000.00)
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	38,167,167.00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	507,275,822.43	60,763,267.06
Penyesuaian Utang Jangka Pendek	0.00	(1,316,000.00)
Perhit. Mutasi Masuk/Keluar & Koreksi Aset Tetap	(4,632,000.00)	(9.98)
EKUITAS AKHIR	18,253,200,283.70	20,140,227,749.54

Sumber : Laporan Realisasi APBD BPKD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi koreksi kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan koreksi/ kesalahan pada nilai aset tetap dan koreksi nilai persediaan sudah dijalankan. Kesalahan atas pencatatan nilai aset tetap dan nilai persediaan diatas baik itu menambah maupun mengurangi harus dilakukan karena akan mempengaruhi ekuitas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Pencatatan koreksi/ kesalahan merupakan bagian dari laporan perubahan ekuitas. terdapat beberapa pencatatan koreksi/ kesalahan BPKD Kabupaten Enrekang

- Koreksi nilai aset tetap = (Rp.1.966.308.551)
- Penyesuaian akumulasi aset tetap = Rp.507.275.822
- Mutasi masuk dan keluar = (Rp.4.632.000)

8. Penyajian Kembali (*Restamen*) Neraca

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Baharuddin (Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan), mengenai pelaksanaan penyajian kembali yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Informan mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi ada dua tahapan yang perlu dilakukan oleh kami dan SKPD lain untuk melakukan penyajian kembali neraca tersebut; jadi yang pertama itu kita siapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, dan lain-lain. yang kedua itu kita siapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, seratu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya beri contoh seperti; piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang tersebut, contoh lain seperti aset tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dan lain-lain”. (Rahmat Baharuddin, Wawancara 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penyajian kembali yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, Terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan oleh kami dan SKPD lain untuk melakukan penyajian kembali neraca tersebut;

- a) Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, dan lain-lain.
- b) Menyiapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, seratu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banyak contoh penyajian kembali yang dilakukan seperti; piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang tersebut, contoh lain seperti aset tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dan lain-lain

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan telaah dokumen dengan cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan melalui daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terlihat bahwa sistem akuntansi koreksi kesalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca, dimana terdapat koreksi nilai aset tetap, koreksi nilai investasi dan koreksi nilai persediaan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang kemudian disajikan kembali pada neraca setelah dilakukan koreksi/ perbaikan. (Gambar 4.10)

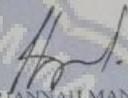
Gambar 4.9 : Sistem Penyajian Kembali (Restamen) Neraca Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

RAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
EKUITAS AWAL	20,140,227,749.54	21,331,609,839.25
PERPLUS/DEFISIT-LO	(15,517,327,140.27)	(16,674,081,387.79)
IMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
(RK-PPKD) EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	15,093,964,403.00	15,808,689,676.00
Koreksi Nilai Aset Tetap	(1,966,308,551.00)	(422,714,802.00)
Koreksi Nilai Investasi	0.00	(900,000.00)
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	33,167,167.00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	507,275,822.43	60,763,267.06
Penyesuaian Utang Jangka Pendek	0.00	(1,306,000.00)
Perhit. Mutasi Masuk/Keluar & Koreksi Aset Tetap	(4,632,000.00)	(9.98)
EKUITAS AKHIR	18,253,200,283.70	20,140,227,749.54

Page 3 of 3

COUN	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
	EKUITAS	18,253,200,283.70	20,140,227,749.54
1	Ekuitas	(12,649,453,795.30)	4,331,538,073.54
1 01	Ekuitas	(12,649,453,795.30)	4,331,538,073.54
1 01 01	Ekuitas	(12,649,453,795.30)	4,331,538,073.54
2	Ekuitas SAL	0.00	0.00
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	30,902,654,079.00	15,808,689,676.00
3 01	RK PPKD	30,902,654,079.00	15,808,689,676.00
3 01 01	RK PPKD	30,902,654,079.00	15,808,689,676.00
TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS		18,267,076,038.70	20,154,930,438.54

Mengetahui,
Pegawai Anggaran


NURI ANNAIT MANDEHA, SKM, M.Si
Pangkat Pembina, IV/a
NIP. 19790603 200212 2008

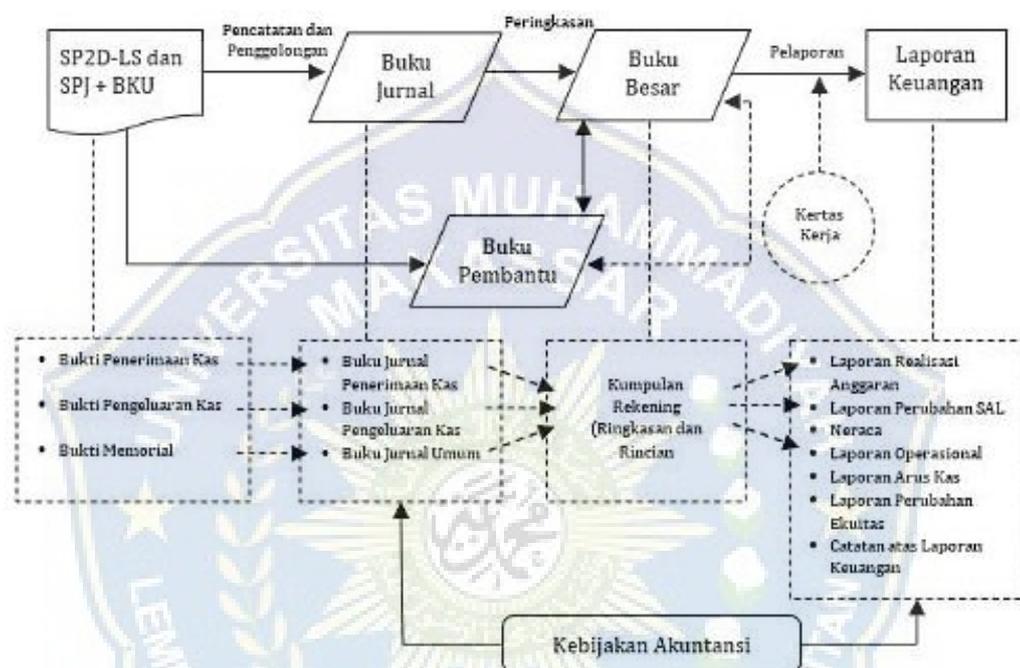
Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penyajian kembali yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017. dimana pencatatan koreksi/ kesalahan pada nilai aset tetap dan koreksi nilai persediaan sudah dijalankan. Kesalahan atas pencatatan nilai aset tetap dan nilai persediaan diatas baik itu menambah maupun mengurangi, setelah dilakukan koreksi/ perbaikan kemudian disajikan kembali pada neraca sesuai dengan hasil koreksi/ perbaikan.

9. Siklus Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Siklus akuntansi bertujuan untuk mengetahui rangkaian dari berbagai tahap-tahap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang secara sistematis dengan tujuan memproses berbagai bukti transaksi keuangan untuk menghasilkan sebuah Informasi akuntansi dalam satu periode.

Berikut disajikan alur sistem akuntansi yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017.

Gambar 4.10 : Siklus Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang (2023)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa siklus atau alur sistem akuntansi yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terdiri dari 3 tahapan:

- Tahap Pencatatan, Tahap ini adalah tahap dimulainya siklus akuntansi yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan.
- Tahap pengiktisaran, Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap pencatatan, adapun tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan jurnal

- c. Tahap Pelaporan, Merupakan tahap terakhir dimana tahap ini hanya dapat dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengikhtisaran sudah dilakukan, tahap pelaporan terdiri dari pembuatan Laporan keuangan.

Sistem dan prosedur Belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

1. **Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).** Kuasa BUD Menganalisa DPA-SKPD yang ada dalam database dan menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selaku SKPD, menyiapkan draft SPD dan mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran. Selanjutnya, PPKD bertugas meneliti draft SKPD yang telah diajukan kuasa BUD dan melakukan otorisasi SPD.
2. **Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).** Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM, berdasarkan SPD yang diterima pengguna anggaran dari PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam belanja. Disamping membuat SPP, Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, dan register SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.
3. **Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).** Tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap

lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah pernah dilakukan.

4. **Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).** Setelah SPM diterima oleh BUD selanjutnya menerbitkan Surat SP2D yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang telah ditunjuk. SP2D adalah spesifik. Penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak SPM-UP/GU/TU/LS diterima. Apabila ternyata kuasa BUD menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan belum lengkap, maka kuasa BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D dalam dua rangkap. Satu dokumen diberikan kepada PPKD yang kemudian akan diberikan pada pengguna anggaran agar menyempurnakan SPM, sementara yang satu akan diarsipkan dalam Register surat penolakan penerbitan SP2D. Proses penolakan SP2D dilakukan paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.

5. **Penerbitan Surat Pertanggungjawaban.** Bendahara Pengeluaran secara wajib Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja langsung kepada kepala SKPD melalui PPKD-SKPD paling lambat sepuluh bulan berikutnya.

6. **Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD).** PPTK mengajukan permohonan dana melalui Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada PA/KPA. Berdasarkan permohonan tersebut PA/KPA memberikan memo persetujuan kepada bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud. Kemudian bendahara pengeluaran mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan PA/KPA kepada PPTK. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, PPTK wajib mengarsipkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar bendahara pengeluaran dalam melakukan pertanggungjawaban belanja.

No	Indikator	Kesesuaian	Penjelasan
1	Pelaporan Piutang	Sesuai	Pencatatan dan pelaporan piutang sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017
2	Pelaporan Persediaan	Sesuai	Pencatatan dan pelaporan persediaan sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017.
3	Prosedur Aset Tetap	Sesuai	Prosedur pencatatan dan pelaporan aset tetap sudah berjalan sesuai peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017.
4	Pelaporan Aset Lain	Sesuai	Pencatatan aset lain sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017.
5	Pelaporan Beban dan Pengeluaran	Sesuai	Pencatatan beban dan pengeluaran sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017.
6	Pelaporan	Sesuai	Pencatatan pendapatan sudah

	Pendapatan		mencakup semua jenis pendapatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017
7	Koreksi Kesalahan	Sesuai	Koreksi kesalahan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai standar Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017
8	Penyajian Kembali (restamen) neraca	Sesuai	Penyajian kembali neraca sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017

1. Sistem Akuntansi Piutang:

- **Dampak:** Jika sistem akuntansi piutang tidak sesuai, pendapatan daerah dari piutang mungkin tidak tercatat dengan benar. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam anggaran dan masalah likuiditas karena pendapatan yang diharapkan mungkin tidak terealisasi. Selain itu, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Sistem Akuntansi Persediaan:

- **Dampak:** Ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi persediaan dapat menyebabkan persediaan yang tidak tercatat atau overstocking, yang pada gilirannya dapat mengganggu pengelolaan persediaan dan menyebabkan pemborosan sumber daya. Laporan keuangan yang tidak akurat juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pengadaan dan penggunaan barang.

3. Prosedur Aset Tetap:

- **Dampak:** Jika prosedur akuntansi aset tetap tidak sesuai, ini dapat mengakibatkan overstatement atau understatement dari

nilai aset tetap. Dampaknya adalah laporan posisi keuangan yang tidak akurat, yang dapat mempengaruhi evaluasi kinerja aset dan perencanaan keuangan jangka panjang.

4. Sistem Akuntansi Aset Lain:

- **Dampak:** Ketidaksesuaian dalam pencatatan aset lain dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan dapat mempengaruhi penilaian terhadap kerjasama dengan pihak ketiga atau aset tak berwujud. Ini juga dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan dan investasi aset.

5. Sistem Akuntansi Beban dan Pengeluaran:

- **Dampak:** Jika sistem akuntansi beban dan pengeluaran tidak sesuai, beban yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mungkin tidak tercatat dengan benar, yang dapat menyebabkan pemborosan dana publik dan penganggaran yang tidak efektif. Hal ini juga dapat mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan prioritas anggaran.

6. Sistem Akuntansi Pendapatan:

- **Dampak:** Ketidaksesuaian dalam pencatatan pendapatan dapat menyebabkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tidak tercatat dengan benar. Ini dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan merusak anggaran yang telah direncanakan. Pendapatan yang tidak tercatat juga dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

7. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan:

- **Dampak:** Jika koreksi kesalahan tidak dilakukan dengan benar, laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan yang signifikan, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

8. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca:

- **Dampak:** Ketidaksesuaian dalam penyajian kembali neraca dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, mempengaruhi transparansi dan kepercayaan publik. Kesalahan dalam penyajian kembali neraca juga dapat mengakibatkan evaluasi yang tidak tepat terhadap posisi keuangan pemerintah daerah, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan keuangan.

Berikut adalah dampak positif yang diharapkan apabila sistem akuntansi dan prosedur akuntansi pada pemerintah daerah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku:

1. Sistem Akuntansi Piutang:

- **Dampak:** Jika sistem akuntansi piutang sesuai, pendapatan dari piutang akan tercatat dengan akurat dan tepat waktu. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran dengan lebih baik, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Selain itu, laporan keuangan yang akurat akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah.

2. Sistem Akuntansi Persediaan:

- **Dampak:** Ketepatan dalam sistem akuntansi persediaan akan memastikan bahwa semua persediaan tercatat dengan benar, mengurangi risiko overstocking atau kekurangan stok. Ini akan membantu dalam pengelolaan persediaan yang efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa barang tersedia saat dibutuhkan. Laporan keuangan yang akurat akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengadaan dan penggunaan barang.

3. Prosedur Aset Tetap:

- **Dampak:** Prosedur akuntansi aset tetap yang sesuai akan memastikan nilai aset tetap tercatat dengan akurat, mencerminkan kondisi dan nilai sebenarnya. Ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan pemerintah daerah, memungkinkan perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih baik, dan memastikan evaluasi kinerja aset yang lebih tepat. Depresiasi dan amortisasi juga akan dihitung dengan benar, mendukung manajemen biaya yang lebih efektif.

4. Sistem Akuntansi Aset Lain:

- **Dampak:** Pencatatan aset lain yang akurat akan meningkatkan keandalan laporan keuangan dan memberikan informasi yang tepat untuk penilaian kerjasama dengan pihak ketiga atau aset tak berwujud. Ini akan membantu dalam pengelolaan dan investasi aset yang lebih baik, serta mendukung kebijakan pengelolaan yang lebih efektif. Aset tak berwujud seperti hak paten atau lisensi

akan tercatat dengan benar, memastikan nilai strategisnya dimanfaatkan secara optimal.

5. Sistem Akuntansi Beban dan Pengeluaran:

- **Dampak:** Sistem akuntansi beban dan pengeluaran yang sesuai akan memastikan semua beban tercatat dengan benar dan tepat waktu, memungkinkan penganggaran yang lebih efektif dan pengelolaan dana publik yang lebih efisien. Ini akan mengurangi risiko pemborosan dana, memastikan pengeluaran sesuai dengan prioritas anggaran, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6. Sistem Akuntansi Pendapatan:

- **Dampak:** Ketepatan dalam pencatatan pendapatan akan memastikan bahwa semua pendapatan tercatat dengan benar dan tepat waktu, mendukung keandalan laporan keuangan. Ini akan memungkinkan pemerintah daerah merencanakan anggaran dengan lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pendapatan digunakan untuk tujuan yang sesuai. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.

7. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan:

- **Dampak:** Koreksi kesalahan yang dilakukan dengan benar akan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan signifikan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, serta memastikan integritas dan akurasi

data keuangan. Kesalahan yang cepat diperbaiki akan mengurangi dampak negatif pada periode laporan berikutnya.

8. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca:

- **Dampak:** Penyajian kembali neraca yang sesuai akan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat dan transparan. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, mendukung evaluasi yang tepat terhadap posisi keuangan pemerintah daerah, serta mempengaruhi keputusan investasi dan kebijakan keuangan dengan lebih baik. Restatement yang dilakukan dengan baik akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017 tentang pokok –pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 8 indikator penting:

1. Sistem akuntansi piutang
2. Sistem akuntansi persediaan
3. Prosedur asset tetap
4. Sistem akuntansi asset lain
5. Sistem akuntansi beban dan pengeluaran
6. Sistem akuntansi pendapatan
7. Sistem akuntansi koreksi kesalahan
8. Penyajian kembali (restamen) neraca

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 8 indikator sesuai dengan Peraturan pemerintah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017, melalui metode wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017 bahwa transaksi piutang, persediaan, aset tetap, yang terdiri atas; tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan serta aset tetap lainnya, dan penyusutan selain itu aset lainnya yang terdiri atas; tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dicatatkan dalam laporan neraca yang terdapat pada aset lancar. Sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas. Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/20085 Tentang Sistem Akuntansi Pusat Investasi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan yang berupa aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: Kas dan setara kas, Piutang, Perlengkapan Kantor, Investasi Jangka panjang, Aktiva tetap, Aktiva Lain-Lain, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas

Berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2017 bahwa pencatatan pendapatan dan beban Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan pada laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah, dimana pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang dianggap sah semuanya sudah dicatatkan pada pos pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Sedangkan beban atau belanja pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana belanja operasional yang terdiri atas; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja hasil bagi pajak dan retribusi, Selain itu dicatatkan juga belanja modal. Semuanya sudah dicatatkan pada pos belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus, atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIPKA).

Pencatatan koreksi/ kesalahan pada nilai aset tetap dan koreksi nilai persediaan sudah dijalankan. Kesalahan atas pencatatan nilai aset tetap dan nilai persediaan baik itu menambah maupun mengurangi harus dilakukan karena akan mempengaruhi ekuitas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Setelah dilakukan koreksi/ perbaikan kemudian disajikan kembali pada neraca tahun berjalan sesuai dengan hasil koreksi/ perbaikan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan

kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almanto Jayadi R (2017) memberikan kesimpulan bahwa penyusunan laporan Operasional pada Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengkuan, serta pelaporan pendapatan dan beban dalam penyusunan Laporan Operasional telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang berbasis akrual. Titi Fahsani (2020) dan Dewi MurhannahPratiwi (2020) meberikan kesimpulan bahwa pencatatan telah sesuai dan mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasian. Hal ini BAPPEDA Enrekang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2017 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah di tentukan oleh pemerintah. Sri Widati, Irda Wati (2019) dalam penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara” memberikan kesimpulan bahwaBPKAD Kab. Konawe telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2017. Semua transaksi piutang, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya dicatat dengan teliti dalam laporan neraca. Pencatatan persediaan termasuk alat tulis kantor dilakukan secara akurat, sementara pencatatan dan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, aset lainnya, termasuk tagihan jangka panjang dan aset tidak berwujud, juga dicatat dengan tepat. Pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, dan transfer pemerintah dicatat dalam laporan operasional, sedangkan beban dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Koreksi kesalahan pencatatan nilai aset tetap dan persediaan dilakukan untuk menjaga keakuratan ekuitas, dan hasil koreksi ini disajikan kembali dalam neraca. Dengan demikian, sistem akuntansi ini mencerminkan komitmen BPKD Kabupaten Enrekang terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan penulis terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang untuk selalu konsisten berpedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan sebagai suatu kebijakan daerah. Agar pengelolaan keuangan dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga terwujud penyajian laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, S. B. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Makassar*.
- Botutihe, T. H. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo*.
- Defitri, S. Y. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Fahmi, N. (2018). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Fahsani, T. (2020). *Analisis Akuntansi Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Enrekang*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, J. A. (2013). *Intoduction to Accounting Information System 8th edition*. South Western Cengage Learning.
- Hertianti, D. N. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kusufi, A. H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi (3 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba empat.
- Mulyana, I. (2010). *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. ISBN1452887659.
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaila. (2014). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan*.

- Permadi. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Skripsi, Universitas Widyatama Bandung).
- Pratiwi, D. M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang.
- R, A. J. (2017). Analisis Penerapan Standar Auntansi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang .
- Ramadhan, E. D. (2013). Pengaruh Pemahaman atas Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Badan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Priangan Timur).
- Ratnasari, D. (2019). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Sri Widati, I.W. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Trianto, M.F. (2018). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan).
- Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4, No.1.
- Vega, N. A. (2021). Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Lampiran Hasil Wawancara

Peneliti : Assalamualaikum pak, Perkenalkan nama saya Juwita, dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi.

Narasumber : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatu.

Peneliti : Bisa kita mulai wawancaranya pak ?

Narasumber : Iya, silahkan dek.

Peneliti : Bisa bapak perkenalkan nama dan jabatan ?

Narasumber : Nama saya Rahmat Baharuddin Jabatan sebagai Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan,

Peneliti : Terimakasih pak, untuk pertanyaan pertama. Bagaimana, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Alhamdulillah dek saya liat itu sudah berjalan dengan baik, Jadi perlu juga adek ketahui bahwa untuk penerapan sistem akuntansi yang kami susun dan rencanakan itu bukan hanya pada instansi kami ini, akan tetapi menyeluruh di Kabupaten Enrekang ini. Kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peneliti : Iya pak, Pertanyaan berikutnya, Bagaimana pelaksanaan Sistem akuntansi piutang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Sistem akuntansi piutang itu meliputi pencatatan dalam hal ini transaksi/kejadian piutang kemudian ada pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan

maupun pengurangan terhadap nilai dari piutang, Adapun piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya.

Peneliti : Bagaimana dengan pelaksanaan Sistem akuntansi persediaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Pelaksanaan dari sistem akuntansi persediaan itu meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan, ada beberapa pihak yang terkait dengan hal tersebut, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan kemudian ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Peneliti : Bagaimana dengan prosedur akuntansi aset tetap yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Jadi aset tetap itu adalah bangunan yang memiliki manfaat dan harus lebih dari 12 bulan untuk digunakan, dalam hal ini digunakan dalam kegiatan pemerintah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. seperti, Kantor SKPD, RSUD, Tanah ada juga mesin dan peralatan. Jadi ada namanya Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Jadi prosedur akuntansi aset tetap, tulang punggungnya ada di PPK-SKPD.

Peneliti : Selain asset tetap apakah ada aset lain pak, dan bagaimana Sistem akuntansi asset lain, yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Iya ada dek, kalau sistemnya itu kita mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. dimana yang termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. contohnya itu, kemitraan dengan Pihak Ketiga seperti sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. ada juga tagihan penjualan angsuran, penyisihan tagihan penjualan dan angsuran tuntutan ganti rugi juga bagian dari itu.

Peneliti : Baik pak, terus mengenai Sistem akuntansi pendapatan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Kalau untuk sistem akuntansi pendapatan itu disusun dalam laporan operasional, dimana pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah seperti; pajak daerah, retribusi daerah, ada juga pendapatan transfer, transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan, transfer pemerintah provinsi, dan pendapatn lain yang sah.

Peneliti : Kalau untuk Sistem akuntansi beban dan belanja yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : jadi kalau berbicara mengenai sistem akuntansi beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan

beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual. Untuk beban dan pengularan itu disajikan di laporan operasional, dilaporan tersebut secara rinci mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.

Peneliti : Tidak selamanya sistem akuntansi keuangan berjalan dengan baik, biasa terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga harus dikoreksi. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana sistem akuntansi koreksi kesalahan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Iya biasa terjadi, mungkin karena capek, kurang istirahat jadi biasa salah input. tapi kan itu kita koreksi kembali atau betulkan kembali. jadi istilah koreksi disini adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan, misalnya ada koreksi koreksi salah pencatatan utang belanja, koreksi pencatatan aset. dan lain-lain.

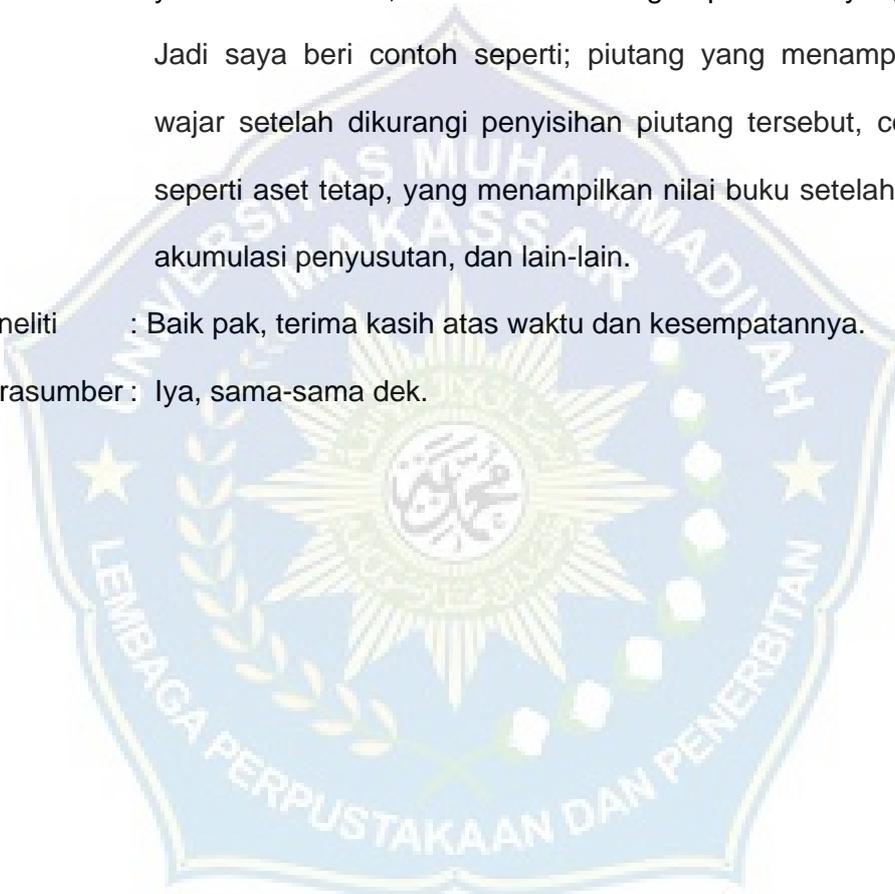
Peneliti : Baik pak, tentu setelah sistem akuntansi koreksi kesalahan sudah dilakukan, bagaimana dengan penyajian kembali (restamen) neraca yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?

Narasumber : Jadi ada dua tahapan yang perlu dilakukan oleh kami dan SKPD lain untuk melakukan penyajian kembali neraca tersebut; jadi yang pertama itu kita siapkan data yang relevan untuk dasar

pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, dan lain-lain. yang kedua itu kita siapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, seratu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya beri contoh seperti; piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang tersebut, contoh lain seperti aset tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dan lain-lain.

Peneliti : Baik pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

Narasumber : Iya, sama-sama dek.





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
(B K A D)**

Jalan Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0420) 21086 Fax. 21921

ENREKANG

91712

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800/141/BKAD/VIII/2022

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1092/05/C.4VIII/III/40/2022, Tanggal, 22 Maret 2022 perihal izin Penelitian, maka yang tersebut Namanya di bawah ini :

Nama : JUWITA
Tempat Tgl Lahir : Bagean, 01 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bagean, Desa Lembang Kec. Enrekang

Benar telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang sejak tanggal 06 April 2022 s/d 06 Mei 2022 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul ***"Tinjauan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang"***.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Enrekang, 09 Agustus 2022

An. KEPALA BKAD
KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN


= NELLI, SE
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
NIP. : 19830422 2001101 2 010

Tembusan :

1. Universitas Muhammadiyah Makassar
2. JUWITA
3. Arsip.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Juwita
Nim : 105731112117
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Juni 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad Nur Hafidza, M.I.P
NIDM. 964 591

BAB I Juwita 105731112117

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to iGroup

Student Paper

2%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

benni888to3ngkal.wordpress.com

Internet Source

1%

4

docplayer.info

Internet Source

1%

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

BAB II Juwita 105731112117

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	3%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
4	Ayu Apriani, Saparuddin Siregar. "Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas atas Biaya Perjalanan Dinas di PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Provinsi Sumatera Utara", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022 Publication	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
6	www.slideshare.net Internet Source	<1%
7	adoc.pub Internet Source	<1%

5 3

- | | | |
|----|--|-----|
| 8 | repository.stiedewantara.ac.id
Internet Source | <1% |
| 9 | Ahmad Fadil Nouval, Rahmat Daim Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution. "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUMATERA UTARA (BKAD)", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2023
Publication | <1% |
| 10 | docplayer.info
Internet Source | <1% |
| 11 | es.scribd.com
Internet Source | <1% |
| 12 | moam.info
Internet Source | <1% |

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

BAB III Juwita 105731112117

ORIGINALITY REPORT

10 %	10 %	3 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mafiadoc.com Internet Source	4 %
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	3 %
3	sochehsatriabangsa.wordpress.com Internet Source	2 %
4	www.coursehero.com Internet Source	2 %

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB IV Juwita 105731112117

ORIGINALITY REPORT			
5%	4%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		2%
2	Putri Marina Wonggo, Dhullo Affandi, I Gede Suwetja. "ANALISIS SISTEM PENATAUSAHAAN BELANJA LANGSUNG DI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication		1%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper		<1%
4	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper		<1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source		<1%
6	Ninik Anggraini, Handika Jihan Seswanto, Ahmad Yani. "Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Revaluasi Aset		<1%

Tetap Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan", JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi), 2023

Publication

- | | | |
|----|--|-----|
| 7 | Submitted to Universitas Musamus Merauke
Student Paper | <1% |
| 8 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | <1% |
| 9 | Fresly Kornelius Engka, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas. "ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR BADAN DIKLAT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017
Publication | <1% |
| 10 | eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source | <1% |
| 11 | pt.scribd.com
Internet Source | <1% |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB V Juwita 105731112117

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anzdoc.com Internet Source	2%
----------	--------------------------------------	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BIOGRAFI PENULIS



Juwita, lahir di Bagean Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tanggal 1 Oktober 1999 dari pasangan Asmuin dan Suryani. Peneliti adalah anak kedua dari empat bersaudara. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu, SDN 72 LEMBANG lulus Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Enrekang dan lulus tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di sekolah SMA negeri 1 Enrekang lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

